

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
OPD : BPSDMD PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum OPD

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS berperan sebagai lembaga hulu yang sangat strategis dalam mempersiapkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur. Menyikapi hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berbenah, menyatukan sikap dan menyamakan langkah, dalam rangka mempersiapkan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi di berbagai level sesuai dengan kebutuhan serta membentuk sikap perilaku sebagai pelayan masyarakat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perangkat Daerah berperan sebagai lembaga hulu dalam mempersiapkan kader pemerintahan pada berbagai level. Dengan demikian, merupakan lembaga strategis untuk meningkatkan profesionalisme aparat daerah dalam rangka menuju pemberdayaan aparat (Empowering Employee). Menyikapi hal tersebut, kedudukan dan peran serta lembaga kediklatan yang harus semakin diperkuat dan ditingkatkan dari aspek institusi, program, personil maupun ketatalaksanaan, untuk mendukung terlaksananya visi dan misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan ke depan.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan bahwa Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Badan BPSDMD Pemprov Sumsel mempunyai fungsi :

- ❖ Penyusunan kebijakan teknis dan perencanaan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- ❖ Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- ❖ Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- ❖ Pengkoordinasian pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- ❖ Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- ❖ Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- ❖ Pelaksanaan administrasi BPSDMD; dan
- ❖ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

b. Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terpilih.

BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tupoksinya mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk itu BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan harus dapat mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu Tujuan ke-4 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan sasaran ke-11 yaitu **Maju Aparatur yang Profesional dan Berintegritas** (melalui meningkatnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah daerah).

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan Mewujudkan Pengelolaan Kelembagaan Diklat yang sesuai dengan standar.

Untuk mewujudkan Tujuan Sumber Daya Aparatur yang kompeten tersebut, dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) Sasaran yaitu Meningkatnya

Kompetensi Manajerial Aparatur, dan Meningkatnya Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio-Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN.

Dalam upaya mencapai Sasaran untuk meningkatkan kompetensi manajerial bagi ASN, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakannya melalui pendidikan dan pelatihan manajerial/struktural bagi pejabat ASN baik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam upaya mencapai sasaran untuk Meningkatkan Kompetensi Teknis Fungsional, Kompetensi Sosio Cultural dan Kompetensi Pemerintahan ASN dilaksanakan melalui upaya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, kompetensi sosio cultural dan kompetensi pemerintahan. Ketiga kompetensi tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam jabatan-jabatan tertentu, sehingga upaya pengembangannya dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Aparatur yang Profesional dan Berintegritas sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Terpilih.

Tujuan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan kedua yaitu mewujudkan pengelolaan kelembagaan diklat yang sesuai dengan standar. Untuk mewujudkan Tujuan yang kedua ini akan dilaksanakan melalui Sasaran-Sasaran berikut yaitu meningkatkan kualitas tenaga kediklatan, meningkatkan jumlah diklat yang terakreditasi serta meningkatkan sarana dan prasarana kediklatan, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.

Agar Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dicapai maka tentu diperlukan penentuan target per tahun selama 5 (lima) tahun ke depan. Penentuan target ditetapkan dengan mempertimbangkan persentase dalam skala 0-100%. Angka tersebut antara lain didapat dengan persentase jumlah Jabatan yang ada dan dikurangi dengan alumni Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat dalam jabatan tersebut.

c. Program dan Kegiatan.

Total Pagu Anggaran BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD dan BLUD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 yaitu sebesar **Rp. 36.984.434.370,-** yang terdiri atas :

Belanja Operasi	: Rp. 35.894.434.370,-
- Belanja Pegawai	: Rp. 16.939.698.642,-

- Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 18.954.735.728,-
Belanja Modal	: Rp. 1.090.000.000,-
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	: Rp. 1.000.000.000,-
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	: Rp. 90.000.000,-

Belanja BPSDMD Prov. Sumsel yang bersumber dari APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, terdiri atas, 2 Program, 10 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- II. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - a. Pengembangan Kompetensi Teknis
 - b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Belanja BPSDMD Prov. Sumsel yang bersumber dari BLUD tersebut terdiri atas 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan program antara lain sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Peningkatan Pelayanan BLUD

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN HINGGA BULAN INI

Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan APBD dan BLUD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sampai dengan Triwulan I pada OPD BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan antara lain sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Pendapatan BLUD	14.000.000.000	2.200.130.530	15,7
	Total	14.000.000.000	2.200.130.530	

b. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BPSDMD Prov. Sumsel berdasarkan jenis belanja (APBD+BLUD)

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)
1	Belanja Operasi	35.894.434.370	5.089.996.401	14,2	15,00
	Belanja Pegawai	16.939.698.642	3.698.332.398	21,9	23,00
	· Belanja Barang dan Jasa	18.954.735.728	1.391.664.003	7,34	9,00
2	Belanja Modal	1.090.000.000	683.345.970	62,69	64,00
	· Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.000.000.000	683.345.970	68,33	70,00
	· Belanja Modal Aset Lainnya	90.000.000	-		
		36.984.434.370	5.773.342.371	15,61	16,85

c. Realisasi Program/Kegiatan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sumber Dana.

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Keuangan (Rp.)	%	Fisik (%)
	Sumber Dana APBD	22.984.434.370	4.726.612.346	20,6	22,00
1	Belanja Operasi	21.894.434.370	4.043.266.376	18,5	20,00
	• Belanja Pegawai	16.939.698.642	3.698.332.398	21,83	23,00
	• Belanja Barang dan Jasa	4.954.735.728	344.933.978	7,00	9,00
2	Belanja Modal	790.000.000	683.345.970	86,5	90,00
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000.000	683.345.970	97,62	100
	• Belanja Modal Aset Lainnya	90.000.000	-		
	Sumber Dana BLUD	14.000.000.000	1.046.730.025	7,5	9,00
	Belanja Operasi	13.700.000.000	1.046.730.025	7,64	9,00
	• Belanja Barang dan Jasa	13.700.000.000	1.046.730.025	7,64	9,00
	Belanja Modal	300.000.000	-		
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000	-		
		36.984.434.370	5.773.342.371	15,61	16,85

d. Indikator Kinerja OPD

Indikator Kinerja OPD berdasarkan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 pada Tahun 2026 :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Dana
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	28	30	107%	APBD dan BLUD

Keterangan :
Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja utama BPSDMD Prov. Sumsel dan indikator dari Perjanjian Kinerja Kepala BPSDMD Prov. Sumsel yang telah disesuaikan dengan Renstra BPSDMD Prov. Sumsel Tahun 2025-2029.

Adapun target dan realisasi kerja BPSDMD Prov. Sumsel berdasarkan bidang diklat sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Bidang Diklat	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Dana
I	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial					
1	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	Orang	60 Orang			BLUD
2	Pelatihan Kepemimpinan Administrator I dan II	Orang	80 Orang			BLUD
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator III dan IV	Orang	80 Orang			BLUD
4	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas I dan II	Orang	80 Orang			BLUD
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas III dan IV	Orang	80 Orang			BLUD
6	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Angkatan I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, dan X	Orang	400 Orang	400 Orang	100 %	BLUD
7	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Angkatan XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII	Orang	400 Orang	400 Orang		BLUD
8	Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, dan XXXVIII	Orang	400 Orang	400 Orang		BLUD
9	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII	Orang	400 Orang			BLUD
10	Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII	Orang	400 Orang			BLUD
II	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional					
1	Diklat Profesionalitas Guru	Orang	40 Orang			APBD

No	Bidang Diklat	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Dana
2	Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah	Orang	40 Orang			BLUD
3	Diklat Manajemen Kepala Sekolah	Orang	40 Orang	40 Orang	100 %	BLUD
4	Diklat Bendahara Sekolah	Orang	40 Orang			BLUD
5	Diklat Pengelolaan Keuangan Satuan Pendidikan Bagi Kepala Sekolah	Orang	40 Orang			BLUD
6	Diklat Manajemen Aset	Orang	40 Orang			BLUD
7	Diklat Kearsipan	Orang	40 Orang			APBD
8	Diklat Kepala/Tenaga Administrasi Sekolah	Orang	40 Orang			BLUD
9	Diklat Manajemen Puskesmas	Orang	40 Orang			BLUD
10	Diklat Fungsional Bidan	Orang	40 Orang			BLUD
11	Diklat Teknis Kearsipan	Orang	40 Orang			BLUD
12	Diklat Pengelola Kinerja AS	Orang	40 Orang			BLUD
13	Diklat Manajemen ASN	Orang	40 Orang			BLUD
III	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti					
1	Diklat Akuntansi Pemerintah Daerah	Orang	30 Orang	30 Orang	100 %	APBD
2	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana	Orang	40 Orang			BLUD
3	Pelatihan Dasar Manajemen Bencana	Orang	40 Orang			BLUD
4	Diklat Public Speaking	Orang	40 Orang			BLUD
5	Diklat Kepamongprajaan bagi Camat	Orang	40 Orang			BLUD
6	Diklat Manajemen ASN	Orang	40 Orang			BLUD
7	Diklat Pemanfaatan AI	Orang	40 Orang			BLUD
8	Diklat Perpajakan	Orang	40 Orang			BLUD
9	Diklat Kepamongprajaan bagi Lurah	Orang	40 Orang			BLUD
10	Diklat Juru Sita Pajak	Orang	40 Orang			BLUD
11	Diklat Pemeriksa Pajak Daerah	Orang	40 Orang			APBD
12	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	Orang	40 Orang			BLUD
13	Diklat Polisi Pamong Praja Bagi ASN	Orang	40 Orang			BLUD
14	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	Orang	40 Orang			BLUD
15	Diklat Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	Orang	40 Orang			BLUD
16	Diklat Pengelolaan BLU	Orang	40 Orang			BLUD
IV	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan					
1.	Akreditasi	Orang				APBD
2.	Uji Kompetensi Pol PP	Orang	40 Orang			BLUD
3	Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pengelolaan	Orang	40 Orang			BLUD

No	Bidang Diklat	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Dana
	Keuangan Daerah					
4	Uji Kompetensi Jafung Pemadam Kebakaran dan Jafung Analisis Kebakaran	Orang	40 Orang			BLUD
5	Uji Kompetensi PPUPD Ahli Pertama	Orang	40 Orang			BLUD
6	Pelatihan Manajemen Risiko	Orang	40 Orang			APBD
7	Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ Level 1	Orang	40 Orang			BLUD
8	Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ Level 1	Orang	40 Orang			BLUD
9	Pelatihan dan Uji Kompetensi PPK TIPE C	Orang	30 Orang			BLUD
10	Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ PPK TIPE C	Orang	30 Orang			BLUD
11	Pelatihan PBJ Desa	Orang	30 Orang			BLUD
12	Pelatihan PPK TIPE B	Orang	30 Orang			BLUD

e. Penghargaan /Prestasi Tingkat Nasional yang diperoleh

- Mendapat Akreditasi A (Sangat Baik) dari Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kearsipan.
- Mendapat 5 (Lima) besar Terbaik sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Berprestasi se-Indonesia oleh LAN RI Tahun 2025.
- Mendapat Akreditasi A (Sangat Baik) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (LP3K) Tahun 2025.
- Mendapat Akreditasi A (Sangat baik) dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mendapat Akreditasi Baik (B) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk Pelatihan Kepemimpinan Adminstrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan Pelatihan Dasar CPNS.
- Mendapat Akreditasi Bintang 1 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI sebagai Lembaga pelatihan terakreditasi.
- Mendapatkan Akreditasi Istimewa dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Deputi Pendidikan dan Pelatihan, Direktorat Perencanaan, Standarisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025.

III. KENDALA YANG DI HADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala

Secara umum tidak ada kendala pada pelaksanaan program kegiatan di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Realisasi keuangan terakhir pada TW I mencapai 16,92 persen.

b. Tindak Lanjut yang diperlukan

-

IV. PENUTUP

Demikianlah penjelasan kami mengenai program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan APBD dan BLUD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk dapat menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan, selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran pada dokumen ini. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, April 2026

**KEPALA BPSDMD
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Prof. Dr. H.M. Edwar Juliarta, S. Sos, MM
Pembina Utama Madya / IV.d
NIP. 197507071997031003**